



**PEMKAB
MAJALENGKA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan - Berprestasi - Berkompetensi
Beriman - Loyal - Adaptif - Kolaborasi

LKIP



MAJA MAJU

Mandiri, Agamis, Jujur, Unggul
Mapag Bagja Raharja

**PRODUCTION
KECAMATAN MAJA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Tahun 2023. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan anggaran dan kegiatan selama Tahun 2023.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Tahun 2023. Memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK dalam mencapai sasaran strategis sesuai Renstra Kecamatan Maja Tahun 2018 - 2023.

LKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

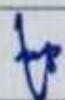
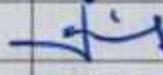
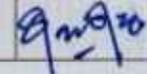
Majalengka, Januari 2024



DONLEARDIANSYAH, S.STP.

Pembina Tk.I

Nip. 19800102 199810 1 001

Diketahui oleh,	
Sekretaris	
Kasi Pem YanUM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	
Kasi PPM	

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 GAMBARAN UMUM	1
	1.2 DATA KEPEGAWAIAN	3
	1.3 ISU STRATEGIS	4
	1.4 SISTEM PELAPORAN	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
	2.1 RENCANA STRATEGIS	6
	2.2 PERJANJIAN KINERJA	8
	2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	12
	3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023.....	12
	3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	12
	3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	19
BAB IV	PENUTUP	20
LAMPIRAN – LAMPIRAN		
	- PERKIN MURNI 2023	
	- PERKIN PERUBAHAN 2023	
	- CASCADING	
	- BUKTI SEBAR LKIP KEPADA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAJA	
	- PENCAPAIAN/PRESTASI PD	
	- SK TIM LKIP	
	- PENGUKURAN KINERJA	

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bukti akuntabilitas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Maja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan.

1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN MAJA

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

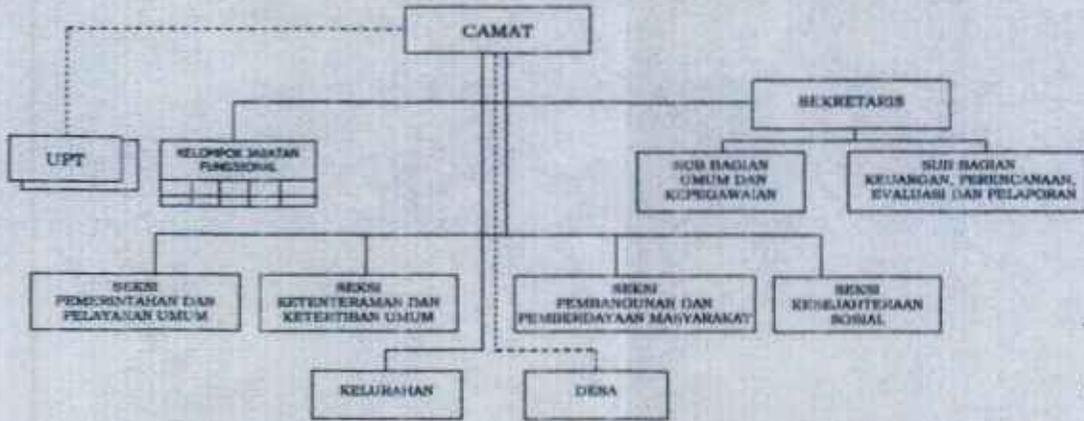
Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 43 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

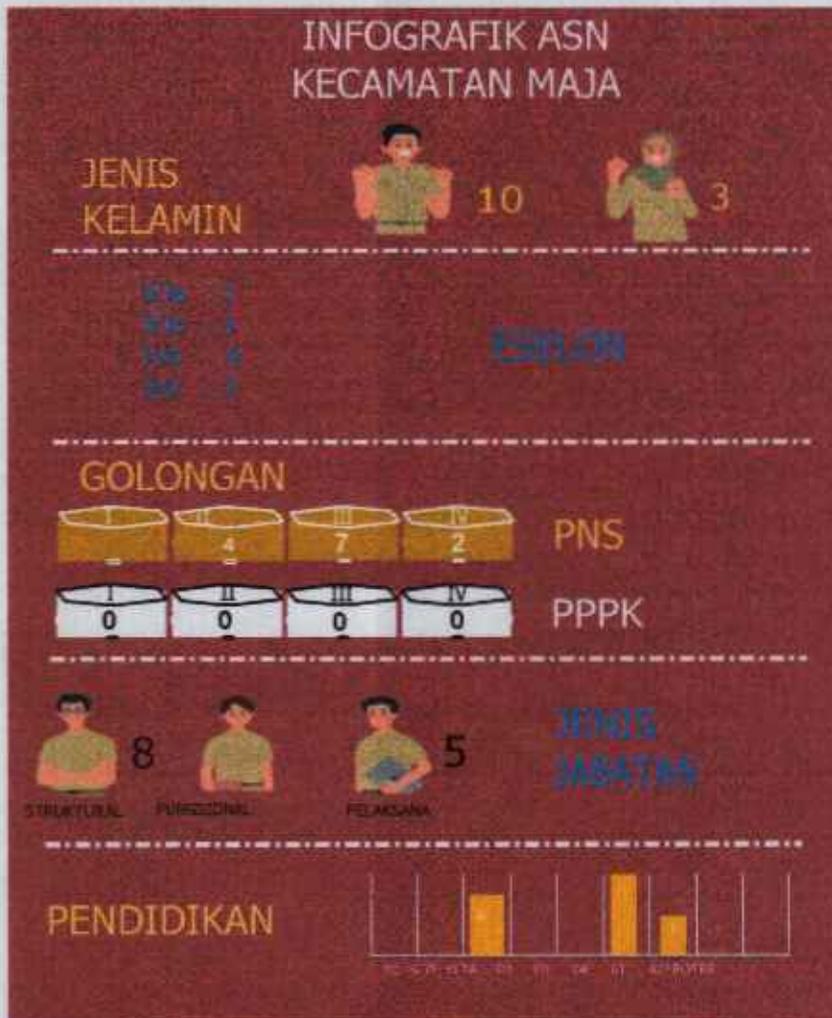
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
 KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
 ttd
 KARNA SOBAHI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,
 AHMAD YODIKIN
 Selain sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
 NIP. 19680327.199603 1 003

1.2 DATA KEPEGAWAIAN

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut:



1.3 ISU STRATEGIS

Isu Startegis Kecamatan Maja adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Maja adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Maja.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa. Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Maja yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya statuskemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan

5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Maja termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Maja akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat

dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Maja.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Maja Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah dipublikasikan, Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maja Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan di Kecamatan Maja dan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Perubahan Tujuan Kecamatan Maja

TUJUAN (2018-2023)	TUJUAN (HASIL REVIEW)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatnya Kualias Pelayanan Publik

Perubahan Sasaran Kecamatan Maja

SASARAN (2018-2023)	SASARAN (HASIL REVIEW)
Pengurangan tingkat kemiskinan	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas
Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentran, dan tertib di masyarakat	
Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan	
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yangbaik	
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	

Perubahan Indikator Kinerja Kecamatan Maja

SASARAN (2018-2023)	SASARAN (HASIL REVIEW)
Presentase penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Presentase penanganan gangguan ketentranman dan ketertiban umum skala kecamatan	
Peningkatan wawasan kebangsaan	

Presentase pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	
Presentase desa yang meningkat status perkembangannya	
Capaian Sakip Perangkat Daerah	
Capaian SKM Perangkat Daerah	
Presentase pemenuhan penunjang perkantoran	
Indeks Kepuasan Masyarakat	

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Renstra Tahun 2018-2023 mengalami perubahan, berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Target setelah perubahan 2023
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	98	100	
2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketertaman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
3	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	

4	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan Masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10	10	
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sikip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	B	B	B	
6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	
			Indeks kepuasan masyarakat	Nilai							88,71

Perjanjian Kinerja Kecamatan Maja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Maja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat	Presentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	100 %
		Presentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	B8 Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Presentase warga yang terlayani oleh Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	90 - 100 %
3	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian desa	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 - 100 %

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Maja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,71 Nilai

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari:

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 22.000.000,00	APBD
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.645.132.691,00	APBD
3.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 47.000.000,00	APBD
4.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 64.445.600,00	APBD
5.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 74.728.000,00	APBD
6.	Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Rp 320.635.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 3.173.831.291,00	

Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.116.842.922	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 70.445.600	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 52.000.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. -	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 47.000.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 298.535.000	APBD
JUMLAH		Rp. 2.684.823.522	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	88,71	88,71	100 %

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)

1. Target dengan Realisasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	88,71	88,71	100 %

Capaian IKM Kecamatan Maja sebesar 100%, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 88,71 dari target 88,71.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan /Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	88,71	88,62	Kenaikan 0,09

Bila dibandingkan realisasi IKM Tahun 2023 dengan Tahun 2022, mengalami peningkatan IKM sebesar 0,09, dimana nilai IKM Tahun 2023 sebesar 88,71 dan Tahun 2022 sebesar 88,62.

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan /Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100 %	100 %	

Sedangkan jika melihat capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022, capaiannya masih sama 100 %.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	88,71	90	98,56 %

Target akhir Renstra 90 sedangkan realisasi sebesar 88,71. Sehingga IKM Kecamatan Maja baru bisa mencapai 98,56 %

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan nilai Pemerintah Kabupaten

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	88,71	83,26	5,45

Jika Nilai IKM Kecamatan Maja dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka nilai IKM Kecamatan Maja lebih tinggi sebesar 5,45. Dimana nilai IKM Kecamatan Maja sebesar 88,71 sedangkan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka 83,26.

5. **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/Kegagalan dan Upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di Tahun selanjutnya**

a. Faktor Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas pembinaan Masyarakat tentang Kesos dengan terbinanya Kader PKK Kecamatan sebanyak 20 Orang tentang administrasi PKK
- Pelayanan Administrasi tepat waktu dengan terlayannya permohonan administrasi pelayanan di bidang Kesos (Rekomendasi Nikah sebanyak 122 dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu sebanyak 73 dokumen) Terpantaunya lansia yang terlantar sebanyak 30 orang, Terlayannya permohonan Kependudukan (Pencetakan KTP sebanyak 1700 lembar dan pencetakan KK 286 lembar, Surat Keterangan Ahli Waris sebanyak 235 dokumen, pernyataan Domisili Haji sebanyak 5 dokumen dan Dispensasi Camat sebanyak 285 dokumen)
- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/Desa dengan terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap kewajiban Pembayaran PBB dimana realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Maja buku 1, 2, 3, dan 4 masing-masing 100 %.
- Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat dengan terbinanya desa tentang potensi unggulan desa (Desa Mandiri sebanyak 6 Desa, Desa Maju sebanyak 10 Desa Desa Berkembang sebanyak 2 Desa.
- Meningkatnya kualitas pengawasan tantribum dengan disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan terpantaunya potensi gangguan tantribum(ijin rame-rame 220 dokumen, dan SKCK 113 dokumen)
- Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam PHBI dan PHBN ditandai dengan ikut sertanya masyarakat dari 18 Desa dalam kegiatan PHBN dan PHBI tersebut
- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/Desa dengan terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, terpilihnya Kelapa Desa sebanyak 5 Desa, disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil Musrenbang, terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan dan terbinanya desa melalui Lomba Desa.
- Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan dengan tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah, Dokumen RKA SKPD, Dokumen RKA Perubahan SKPD, DPA, DPPA, LKIP dan LKPJ.
- Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dengan Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN, dan Tersusunnya Laporan Keuangan.
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan dengan Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Tersedianya Makanan dan Minuman, Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Tersedianya Mebeler Kantor, Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya, Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya, Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Terpeliharanya kendaraan dinas, Terpeliharanya Mebel, Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya dan terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Faktor Kegagalan

- Letak geografis
- Masih kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Maja
- Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja apartur pemerintahan desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana insfrastruktur perdesaan.

c. Upaya yang telah dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebeler Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel , Pemeliharaan Peraltan dan mesin lainnya , Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar, Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa
- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam

mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum

- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN
- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.







d. Upaya yang akan dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Mebeler Kantor, Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan kendaraan dinas, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peraltan dan mesin lainnya , Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar , Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB.
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa.
- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum.
- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN.

- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Kasubag KPEP	2.116.842.922
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	70.445.600
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kasi PPM	52.000.000
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasi Trantib	0
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasi Kesejahteraan Sosial	47.000.000
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dan Kasi Trantib	298.535.000

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100 %.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 4,57 % atau sebesar Rp. 120.996.528 dari pagu anggaran Rp. 2.645.525.522 dengan realisasi Rp. 2.524.528.994

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	95,43

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Maja Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Maja pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 100% dari IKU sebanyak 1. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Maja pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2023 adalah sebesar 4,57% atau sebesar Rp. 120.996.528.

Kecamatan Maja terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.

LAMPIRAN-
LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **DONI FARDIANSYAH, S.STP**
Jabatan **Camat Maja**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan **Bupati Majalengka**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023
Pihak Pertama,

DONI FARDIANSYAH, S.STP
NIP. 19800102 199910 1 001

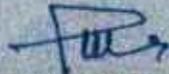
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MAJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat	Presentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	100 %
		Presentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 - 100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 22.000.000,00	APBD
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.645.122.691,00	APBD
3.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 47.000.000,00	APBD
4.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 64.445.800,00	APBD
5.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 74.728.000,00	APBD
6.	Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Rp 320.535.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 3.173.831.291,00	

Majalengka, Januari 2023

Bupati Majalengka,



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Camat Maja,



DONI FARDIANSYAH, S.STP
NIP. 19800102 199810 1 001

PERKIN PERUBAHAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DONI FARDIANSYAH, S.STP**
Jabatan : **Camat Maja**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : **Bupati Majalengka**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
Pihak Pertama,

DONI FARDIANSYAH, S.STP
NIP. 19800102 199810 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023
KECAMATAN MAJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,71 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.116.842.922	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 70.445.600	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 52.000.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. -	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 47.000.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 298.535.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 2.684.823.522	



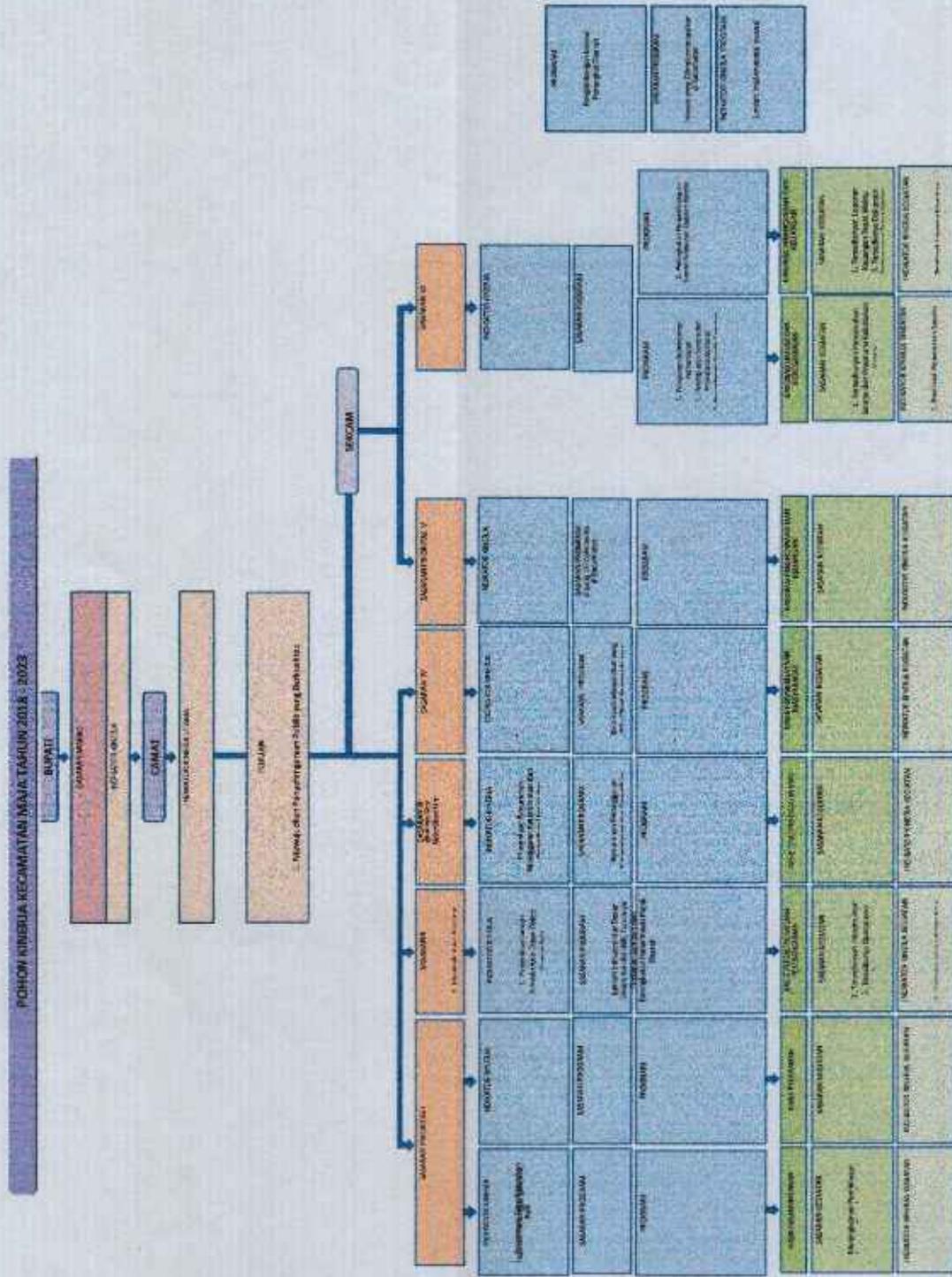
Dr. W. JARNA SOBANI, M.M.Pd

Majalengka, November 2023
Camat Maja,



DONI FARDIANSYAH, S.STP
NIP. 19800102 199810 1 001

CASCADING



Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD





**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN MAJA**

Alamat : Jln Pasukan Sindangkatih No. 04 MAJA Telp./Faksimilie (0233) 262420 Kode Pos 45461
Email : majakecamatan@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT MAJA
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 8 Tahun 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN MAJA KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**

CAMAT MAJA KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi instansi;
 - b. bahwa agar dalam penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Maja Kabupaten Majalengka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penetapan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberitahuan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka;
11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Maja Tahun 2023
- Ketiga** : Tim Penyusun LAKIP wajib menindak lanjuti hasil review oleh APIP/ Inspektorat agar penyusunan LKIP memenuhi kriteria andal, transparan dan akuntabel.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maja

Pada Tanggal : 5 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Camat Maja
Nomor : 08 Tahun 2024
Tanggal : 05 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023
KECAMATAN MAJA KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Doni Fardiansyah, S.STP.	Camat	Pembina
2.	Taham, SE, Msi.	Sekcam	Ketua Tim
3.	Ii Siti Patimah, SE.	Kasubag KPEP	Sekretaris
4.	Dety Meyli Herawatie, S.AP.	Kasipem Yanum	Anggota
5.	Ayun Haerudin, ST	Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	Anggota
6.	Tatang Sukma Purba, S.Kep.Ners	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	E.Suryadi, SE.	Kasi Trantibum	Anggota
8.	Dedeh Rosidah, S.Pd.I	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengumpul Data
9.	Obay Sobari, SE.	Bendahara	Pengumpul Data
10.	Dade Maskhuri	Pelaksana	Pengumpul Data

Camat Maja,



Doni Fardiansyah, S.STP.

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA JANUARI S.D. DESEMBER 2023

KECAMATAN MAJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Deskripsi secara ringkas upaya yang telah dilakukan
1	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	IKM	88,71	88,71	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.116.842.922	2.057.248.594	94,48	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.445.600	69.745.400	99,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
						PROGRAM	52.000.000	0	100	Koordinasi Kegiatan

